



Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	ATI: Tagihan harus Dilunasi		
Date	3 Juli 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	28	Article Size	
Journalist	Anggara Pernando	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

► TUNGGAKAN LAND CAPPING

ATI: Tagihan Harus Dilunasi

JAKARTA—Asosiasi Tol Indonesia mendesak pemerintah segera melunasi tagihan dana talangan yang sudah dikeluarkan oleh Badan Usaha Jalan Tol untuk *land capping*.

Anggara Pernando
redaksi@bicnic.co.id

Hingga kini, pengusaha mengklaim sudah mengeluarkan dana di atas Rp600 miliar.

Persoalan tunggakan *land capping* ini dinilai sangat menyulitkan para pengusaha jalan tol. Pasalnya, nilai investasi yang mereka tanggung terus bergerak naik akibat berbagai masalah makroekonomi, sedangkan

kepastian penggantian dari pemerintah jadinya sulit dipastikan.

"Posisi terakhir tagihan [*land capping*] dari BIJTT (Badan Usaha Jalan Tol) [ke pemerintah] sudah di atas Rp600 miliar," tutur Fachur Rochman, Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI) kepada *Bisnis*, Rabu (2/7).

Land capping merupakan kebijakan pemerintah untuk menanggung kelebihan biaya pembebas-

an tanah jika melebihi plafon yang disepakati dalam tender. Pemerintah akan menanggung perubahan harga tanah di atas 110% dari nilai yang disepakati dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Fachur mengharapkan setelah UU tentang pembebasan lahan

► **Kepastian penggantian dana *land capping* dari pemerintah jadinya sulit dipastikan.**

► **Para pelaku usaha jalan tol berharap investasi mereka lebih terjamin setelah adanya UU tentang tanah.**

diberlakukan, maka para pelaku usaha jalan tol mengharapkan modal yang mereka tanai akan lebih terjamin.

Pasalnya, penyedia tanah sudah dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak lagi ada perselisihan soal besarnya *land capping*. Selain itu, UU tentang pembebasan tanah juga memberi kepastian waktu pembebasan tanah kurang dari 2 tahun.

SERBASALAH

Menurutnya, selama ini pihak pengusaha menjadi serbasalah dengan kebijakan *land capping*, karena posisi pembebasan tanah merupakan tanggung jawab pemerintah. Sementara itu, investor hanya membantu mempercepat prosesnya.

Pembangunan infrastruktur jalan tol pada periode ke-11 pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai masih jauh dari target.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sepanjang 2010-2014, panjang jalan tol yang mampu dibangun pemerintah maupun swasta hanya mencapai 263,3 kilometer.

Pada hal, target pemerintah membangun jalan tol selama periode 5 tahun pemerintahan SBY sepanjang 1.296 kilometer. ■